

Judul : Korban Gagal Ginjal Keluhkan Kurang Perhatian Pemerintah
Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Korban Gagal Ginjal Keluhkan Kurang Perhatian Pemerintah

TIM advokasi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) Siti Habiba kecewa atas minimnya tanggung jawab negara atas kasus GGAPA yang telah merenggut ratusan nyawa anak.

Habiba mengungkapkan, hingga kemarin, belum ada satu pun bantuan yang turun dari pemerintah untuk korban GGAPA. Dia menyebut banyak dari keluarga korban yang terpaksa menanggung sendiri biaya perawatan dan penyembuhan anak mereka.

"Belum ada penggantian sama sekali dari Kemenkes. Sampai ini belum ada penggantian apa pun. Sampai hari ini, sampai ada kasus baru.

Bahkan yang rawat jalan pun, untuk beberapa alat medis yang diperlukan, itu mereka beli sendiri, seperti alat tracheostomy. Itu, kan, alat itu harusnya diganti setiap satu bulan sekali. Harganya Rp 50 ribu," ungkap Habiba saat dihubungi, kemarin.

Pada hal, sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memerintahkan Kemenkes untuk

proaktif memberikan bantuan moral dan semangat kepada keluarga korban sebagai bentuk empati pemerintah atas apa yang terjadi.

"Kita minta Kementerian Kesehatan untuk membantu orang-orang yang terkena itu. Kita minta supaya mereka (Kemenkes) datang dan memberikan semangat kepada mereka (untuk) membantu orang-orang yang terkena penyakit itu, korban-korban itu," ujar Wapres dalam keterangan pers di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2).

Terkait dengan perbedaan hasil

Habiba juga menyesalkan betapa lambatnya respons dan penanganan pemerintah untuk menuntaskan kasus GGAPA. Sudah berbulan-bulan sampai ada kasus baru, kata dia, masih belum terlihat negara menaruh atensi yang besar untuk kasus itu.

"Harapan dari keluarga tentu mereka yang saat ini masih dirawat jalan atau rawat inap itu diberi pengobatan yang maksimal," ujar Habiba.

Terkait dengan perbedaan hasil

uji laboratorium Badan POM dan Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta, kedua lembaga itu memberikan klarifikasi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu (8/2) lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hasil Labkesda tentang obat itu mengandung cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG). Sementara itu, hasil lab dari Badan POM menunjukkan hasil yang negatif.

Kepala Labkesda DKI Budi Wibowo

menegaskan telah bekerja sesuai dengan instruksi Kemenkes mendalami kasus GGAPA. Badan POM mengatakan pengujian terhadap sampel pada 2-3 Februari 2023 menunjukkan sampel memenuhi syarat (MS).

"Artinya sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai, demikian yang tertulis dalam keterangan di situs resmi Badan POM, Kamis (9/2). (Dis/X-10)